



Perlu Indikator yang Lebih Valid

YOGYA (KR) - Anggota Komisi D DPRD Kota Yogyakarta Bambang Anjar Jalumurti, mengungkapkan pihaknya sudah menggelar rapat kerja bersama tim eksekutif terkait persoalan KMS. "Ini harus menjadi evaluasi, dan ternyata kita temukan indikator yang perlu dipertegas kembali agar semakin valid," tandasnya.

Rapat kerja melibatkan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) selaku instansi yang menerbitkan KMS. Selain itu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) terkait indikator, dan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) kaitannya dengan akses pendidikan pemegang KMS.

Bambang mengaku dalam rapat tersebut pihaknya meminta pembukaan data secara gamblang. Hal ini karena pemegang KMS tahun ini meningkat dibanding tahun lalu, namun jumlah warga yang tercoret juga cukup banyak. Dari temuan tersebut pihaknya lantas melakukan sampling terhadap data warga yang tercoret dari pemegang KMS. Hasilnya, secara realita kehidupannya masih jauh dari mandiri namun hasil verifikasi tergolong mandiri. Keluarga yang disampel tersebut memiliki penghasilan Rp 1,8 juta per bulan dan menanggung tiga orang anak yang masih sekolah. Namun karena memiliki kulkas, smartphone serta daya listriknya 900, akhirnya hasil skoring masuk kategori mandiri. Padahal, imbuh Bambang, kulkas yang dimiliki keluarga tersebut untuk kepentingan produksi usaha serta smartphone mendukung kegiatan pembelajaran. "Kalau dikomparasikan UMK yang mencapai Rp 2 juta lebih kan tentu masih jauh dari kategori mandiri. Apalagi masih harus menanggung keperluan sekolah untuk anak-anaknya. Realitanya tentu belum mandiri," tandasnya.

Oleh karena itu Bambang mendesak agar data warga yang tercoret dari KMS perlu ditelusuri. Indikator yang digunakan pun harus dievaluasi serta diperbarui agar validitasnya terjaga. Kondisi tersebut harapannya menjadi titik awal dalam intervensi kebijakan afirmatif yang tepat sasaran. **(Dhi-d**



KR-Ardhi Wahdan

Ketua Komisi D memberi penjelasan warga yang mengadu ke dewan.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 05 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005